

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp13,4 T (929,9%)
▼ -34,4% (yoy)

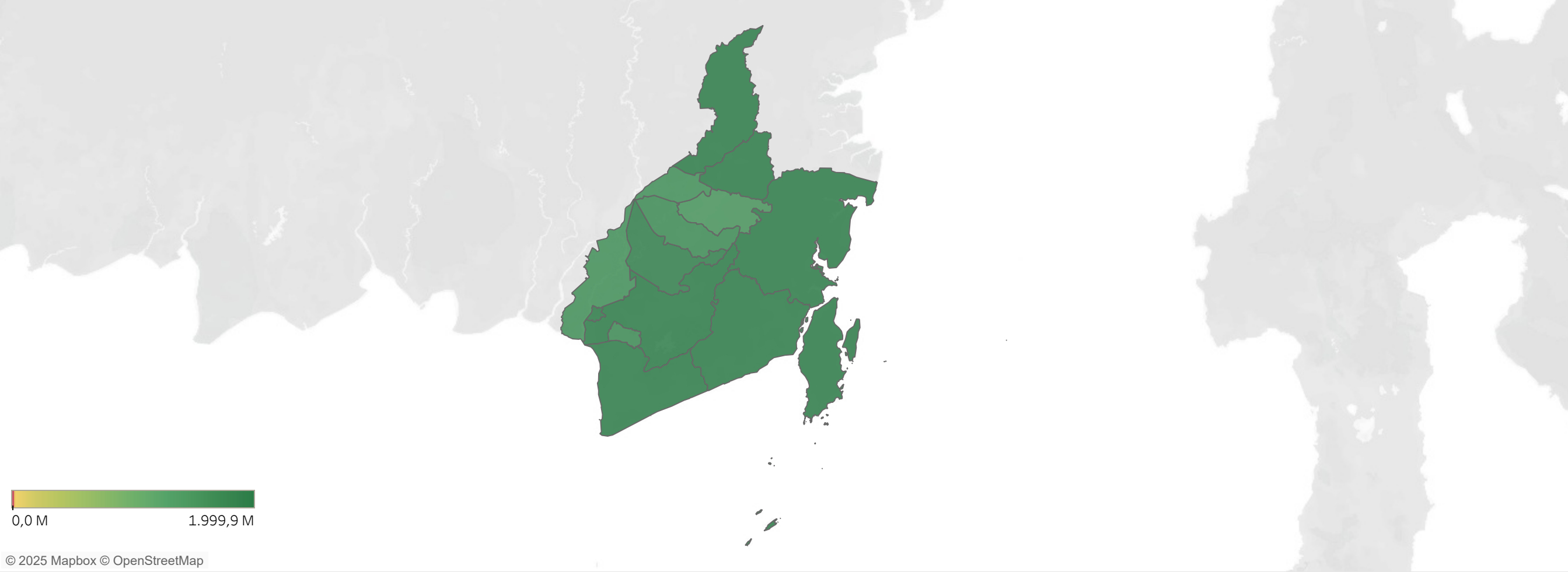
Belanja

Rp38,2 T (91,4%)
▲ 0,5% (yoy)

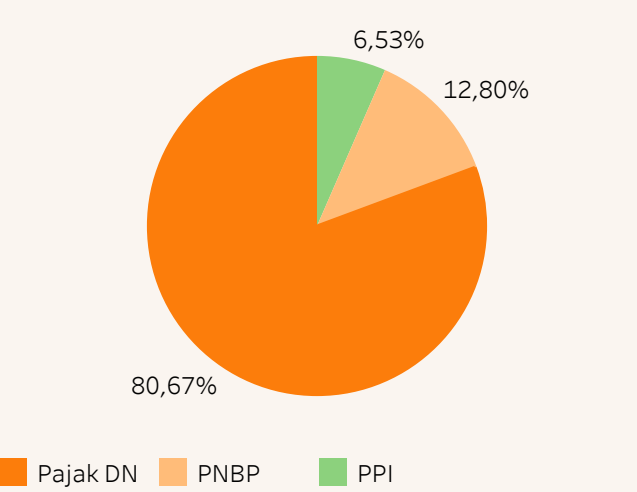
Defisit

Rp-24,8 T (61,4%)
▲ 41,4% (yoy)

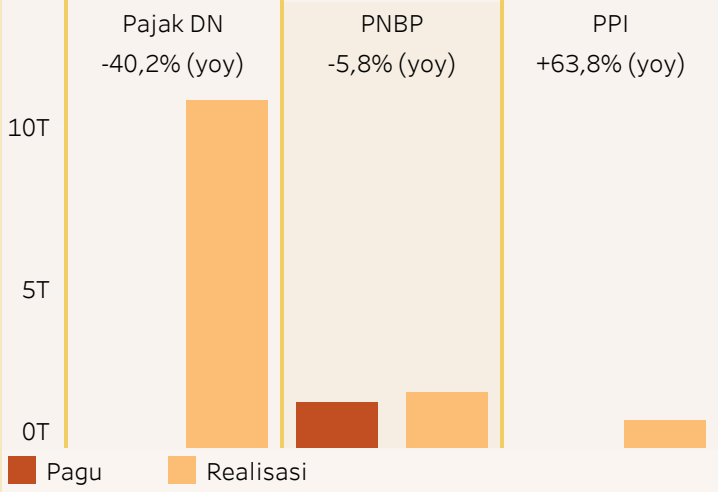
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



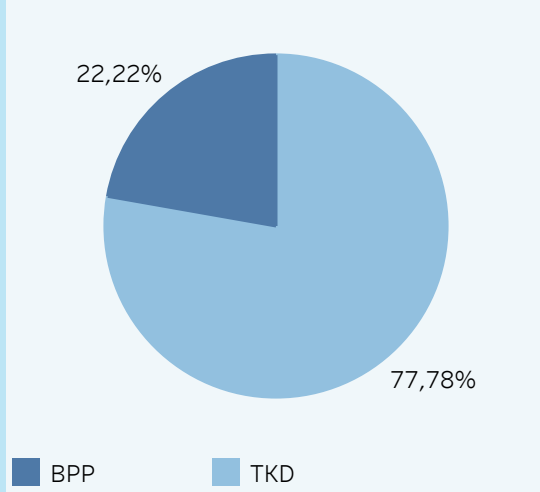
Persentase Komposisi Pendapatan



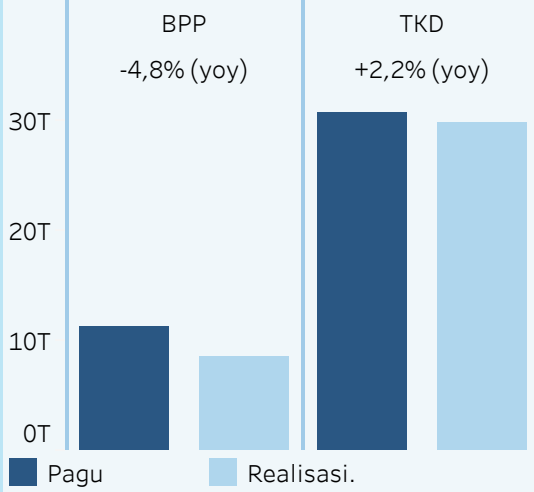
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



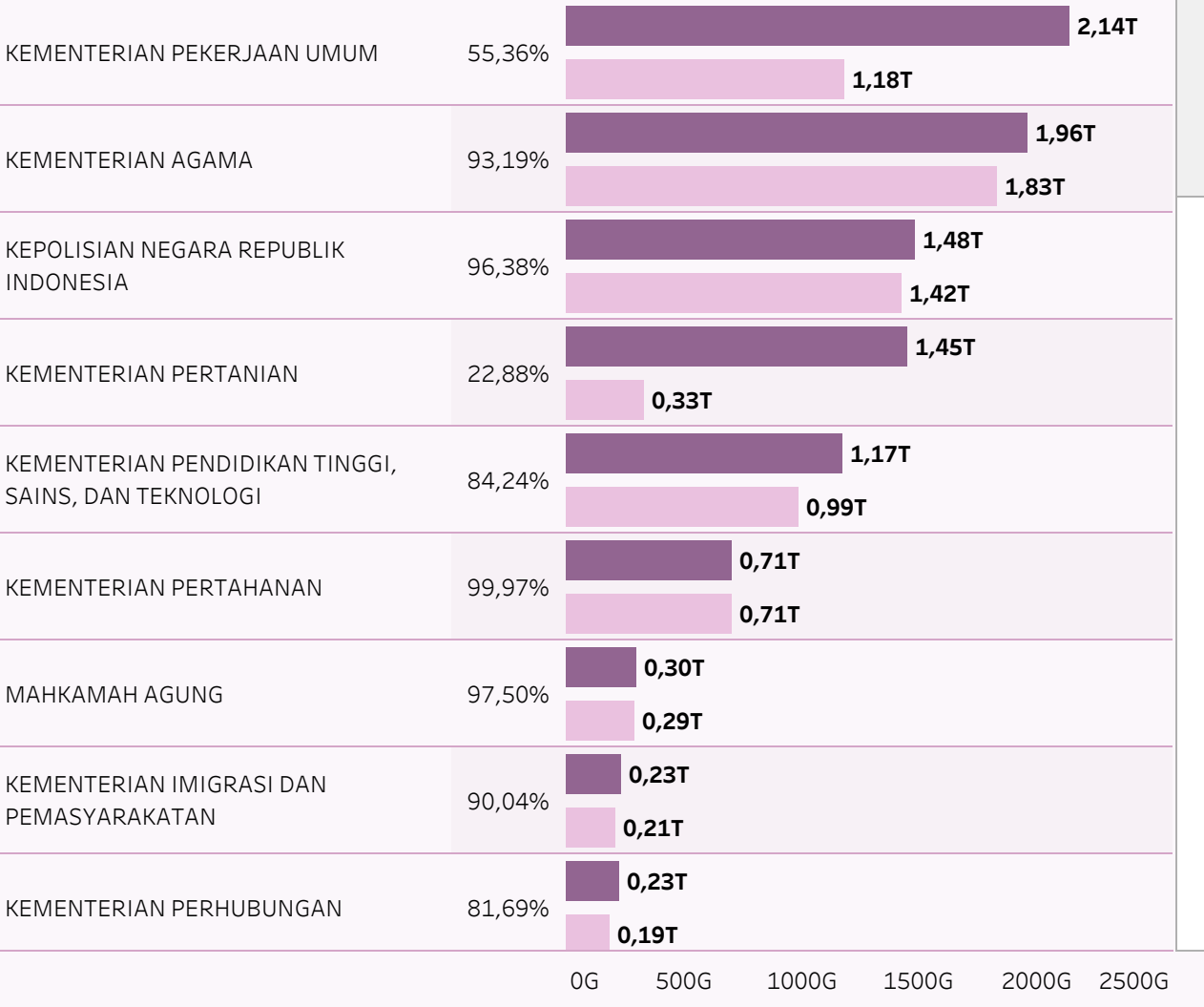
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	20,5T	13,4 T	▼ 34,42%
Grand Total	20,5T	13,4 T	▼ 34,42%

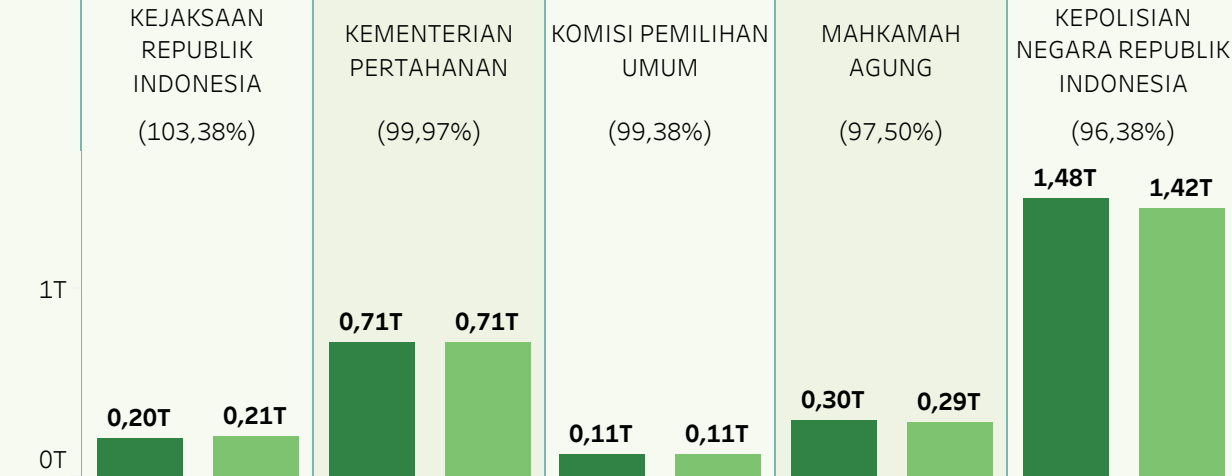
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	38,0T	91,2%	41,8T	38,2 T	91,4%	▲ 0,54%
Grand Total	41,7T	38,0T	91,2%	41,8T	38,2 T	91,4%	▲ 0,54%

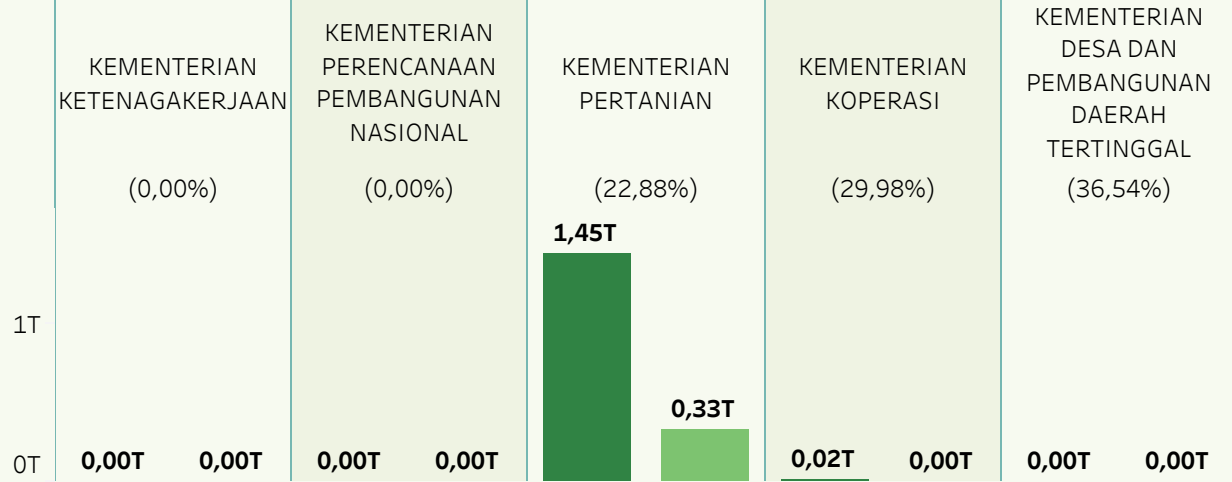
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



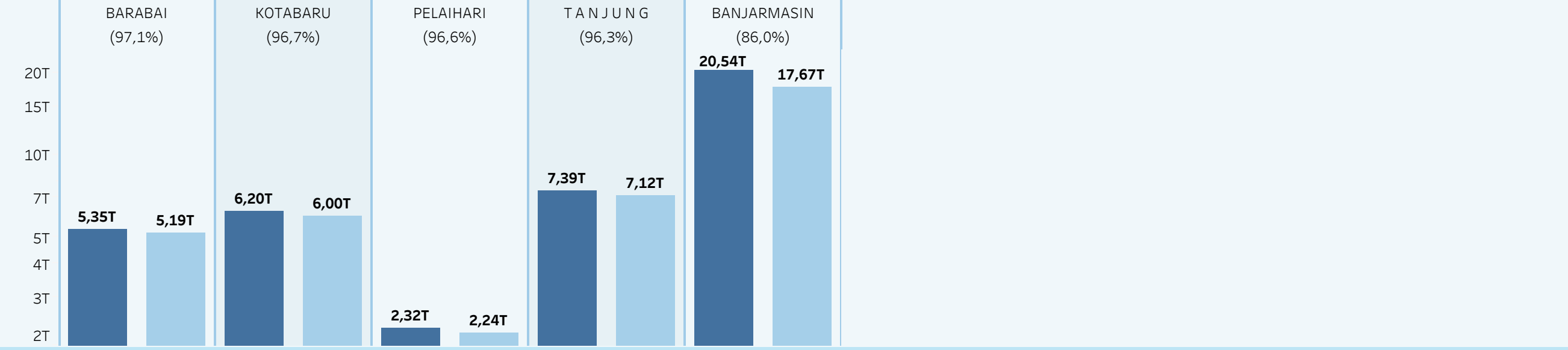
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



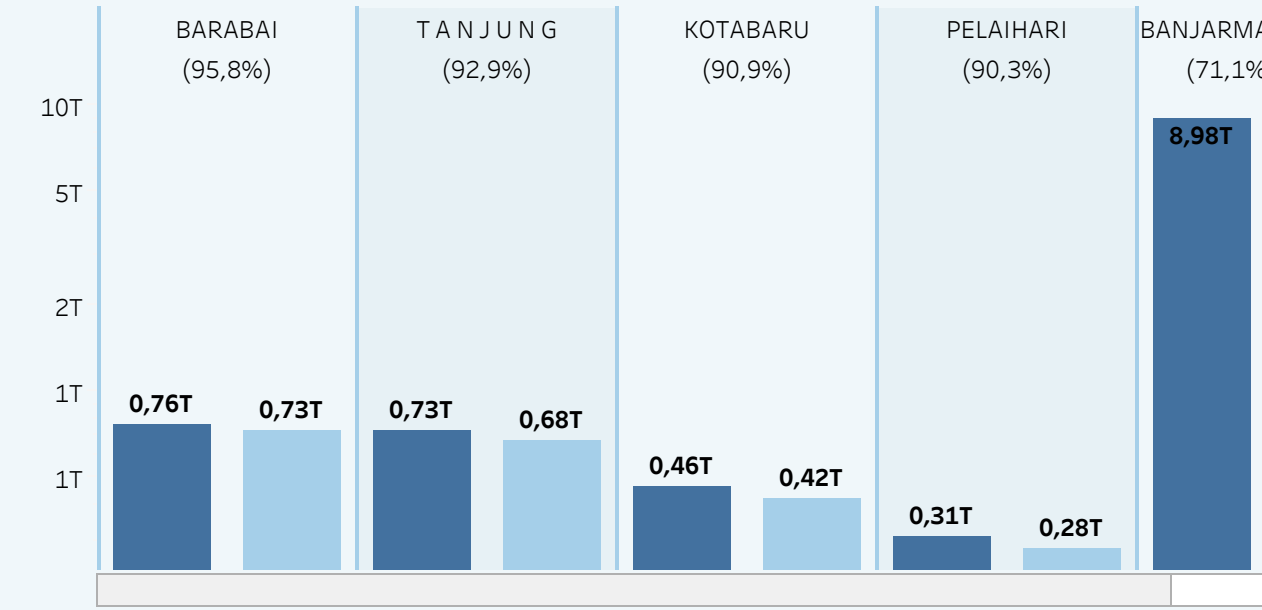
5 KL Persentase Realisasi Terendah



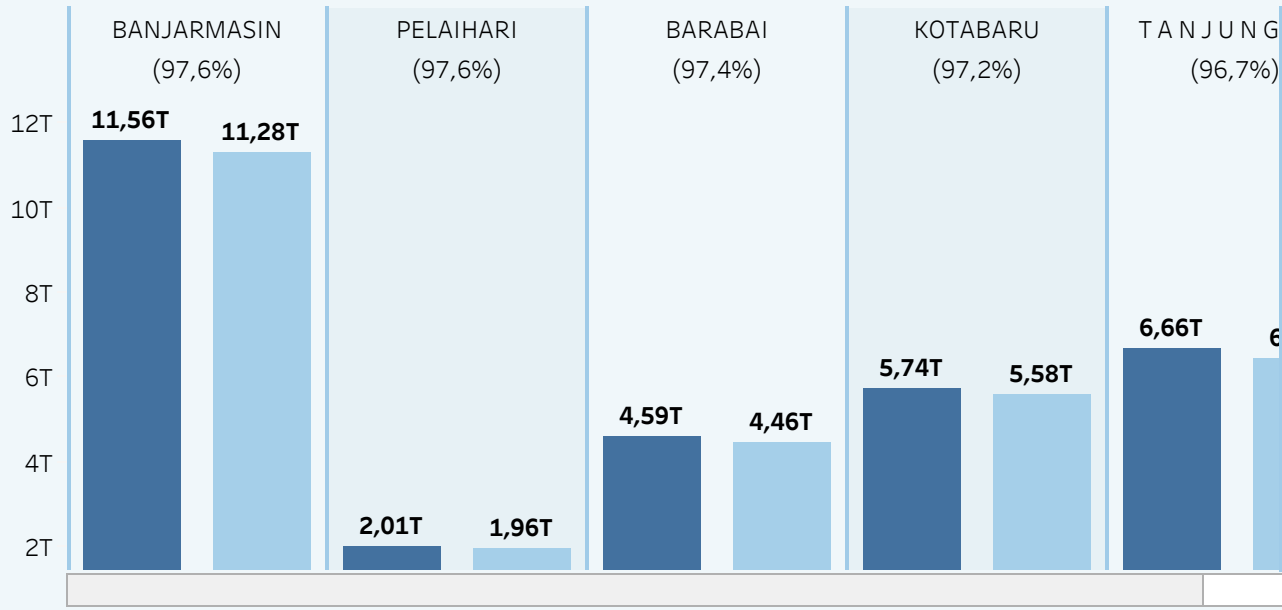
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 19 Desember 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp13,43 triliun (60,88%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,05 triliun, terkontraksi 34,42% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 53,19% (Rp 10,83 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 337,54% (Rp876,83 miliar), serta PNBP mencapai 120% (Rp1,72 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (80,67%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 19 Desember 2025

- Kinerja Belanja Negara sebesar Rp38,2 triliun (91,4%) dari pagu Rp41,8 triliun, tumbuh 0,54% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 75,5% (Rp8,49 triliun) dari pagu Rp11,24 triliun, terkontraksi 4,8% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 97,3% (Rp29,73 triliun) dari pagu Rp30,56 triliun, tumbuh 2,2% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (77,78%).
- Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,14 triliun, dengan realisasi mencapai 55,36% (Rp1,18 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 99,97 (Rp0,71 triliun) dari pagu Rp0,71 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 22,88% (Rp0,33 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.
- Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kejaksaan RI dengan realisasi 103,38% (Rp0,21 triliun) dari pagu Rp0,20 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Pertanian dengan realisasi 22,88% (Rp0,33 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional realisasi belanjanya masih 0%.
- Kinerja KPPN,** Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 97,1% (Rp5,19 triliun) dari pagu Rp5,35 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 86,0% (Rp17,67 triliun) dari pagu Rp20,54 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Sampai dengan bulan November 2025, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.10,62 triliun atau 52,19% dari target penerimaan. Hampir seluruh jenis pajak realisasinya tumbuh negatif jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hanya PBB dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang mengalami tumbuh positif.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak perlu segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, khususnya pada sektor-sektor potensial yang mengalami kontraksi, melalui peningkatan pengawasan kepatuhan, optimalisasi pemanfaatan data perpajakan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pemulihan aktivitas ekonomi daerah, memberikan asistensi kepada pelaku usaha terdampak, serta memastikan kebijakan insentif pajak tepat sasaran agar dapat menahan penurunan penerimaan dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah hingga akhir tahun anggaran.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Masih banyak pengajuan permohonan dispensasi kontrak dari satker lingkup Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI dimana kontrak tersebut masuk dalam alokasi belanja program prioritas Presiden RI. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pengajuan SPM diluar batas waktu yang telah ditetapkan dan pencapaian program prioritas Presiden RI.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Perlunya peningkatan koordinasi yang intens antara tim pengelola proyek, kontraktor, dan pihak terkait untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan menjaga kelancaran pekerjaan. Pengawasan yang intensif dan pengendalian risiko harus dilakukan untuk mengatasi hambatan, dalam rangka akselerasi penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan penambahan tenaga kerja atau sumber daya yang ada.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 10.982 menjadi 11.322 unit, Peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 10.172 unit menjadi 10.619 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 684 lokasi menjadi 695, jumlah Kab./Kota yang ada program FLPP 13 Kab./Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.329.051.360.536,- menjadi Rp1.387.467.727.286,-

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (microsite) sebanyak 2.013
3. Jumlahkoperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 770 menjadi 802.
4. Jumlahkeseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 861 menjadi 902.
5. Jumlahkoperasi melakukan permohonan proposal bisnis tetap 117 sama dengan periode sebelumnya
6. Jumlahpermohonan proposal bisnis tetap 380 sama dengan periode sebelumnya.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | Revitalisasi Sekolah, Jumlah target revitalisasi sekolah di provinsi Kalimantan Selatan adalah 311 sekolah dan seluruhnya telah dikontrakkan, yang terdiri dari Kementerian PU sebagai penanggungjawab 46 madrasah, Kementerian Dikdasmen sebagai penanggungjawab untuk Ditjen PDM 219 dan Ditjen Vokasi PKPLK 28 sekolah, Kementerian Transmigrasi sebagai penanggungjawab 18 sekolah.

Progres target 46 madrasah, Kementerian PU menargetkan 14 madrasah selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah ditargetkan selesai tahun depan melalui skema multy years contract (MYC).

Progres target 18 sekolah, Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Progres target 247 sekolah, Kementerian Dikdasmen.

F | SMA Unggul Garuda, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp648,17 M (35,05%) menjadi Rp748,51 M (40,48%) dari pagu sebesar Rp1,85 T.

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

I | Progres Peluang Investasi Daerah s.d. 19 Desember 2025

1. Progres peluang investasi daerah s.d. 19 Desember 2025 menunjukkan sejumlah 4 peluang investasi, sama dari pemetaan bulan sebelumnya, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp5,72 triliun, sama dari pemetaan bulan sebelumnya. Dari 18 sektor lapangan usaha, 4 peluang investasi tersebut tersebar di 3 lapangan usaha, didominasi oleh Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sejumlah 2 peluang investasi (50% dari total peluang investasi) dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp202,07 miliar (3,53% total perkiraan nilai investasi).
2. Dari sisi progres tindak lanjut, sebanyak 1 peluang investasi (25%) sudah terdapat tindak lanjut di antaranya berupa penyampaian laporan APID terkait Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru ke Direktorat SMI pada tahun sebelumnya, sedangkan sebanyak 3 peluang investasi (75%) belum terdapat tindak lanjut. Terkait laporan Pengelolaan Limbah Medis tersebut, saat ini masih menunggu tindak lanjut dari pihak Direktorat SMI.

No	Sektor	Peluang Investasi	Perkiraan Nilai Investasi (satuan Rp)
1	Industri Pengolahan	Smelter Slab Billet Steel Kab. Tanah Bumbu	5.520.000.000.000
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	SPAM Regional Banua Enam Bendungan Tapin	197.772.720.000
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru	4.294.967.295
4	Transportasi dan Pergudangan	Pergudangan, Pusat Distribusi Banjarmasin	300.000.000
Total			5.722.322.687.295

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lebih memilih bertempat tinggal di sekitar pantai, sedangkan rumah subsidi dibangun di wilayah daratan yang jauh dari pantai. Hal ini menyebabkan rumah subsidi kurang diminati oleh para nelayan.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan perumahan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat nelayan, antara lain dengan membangun rumah subsidi di kawasan pesisir atau dekat pusat aktivitas melaut, menyesuaikan desain rumah agar tahan terhadap kondisi lingkungan pantai, serta menyediakan infrastruktur dan akses transportasi yang memadai apabila rumah berada di wilayah daratan atau jauh dari pantai.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Koperasi Desa Merah Putih masih terkendala memenuhi permintaan barang dari konsumen karena adanya pembatasan pasokan dari penyedia seperti pembatasan gas elpiji dari Pertamina dan pembatasan pasokan beras dari Bulog.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

KDMP perlu dilakukan penguatan koordinasi dan kemitraan dengan penyedia utama seperti Pertamina dan Bulog agar koperasi memperoleh alokasi pasokan yang lebih jelas dan berkelanjutan. KDMP juga dapat melakukan diversifikasi sumber pasokan dengan menggandeng distributor alternatif atau produsen lokal yang sesuai dengan ketentuan.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan penuh dari jajaran Pemda lingkup Kalsel terhadap program SR ini dan menelaah kembali permasalahan di lapangan serta bersinergi dengan pemerintah pusat.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Diperlukan dukungan penuh dan komitmen bersama dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan koordinasi lintas OPD, penelaahan menyeluruh terhadap permasalahan yang muncul di lapangan, serta penyusunan langkah tindak lanjut yang terintegrasi.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Alokasi anggaran untuk program revitalisasi sekolah belum memenuhi seluruh kebutuhan sehingga sekolah masih berharap alokasi anggaran program revitalisasi tahun anggaran berikutnya.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Pemerintah perlu melakukan penajaman skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan sekolah, serta menyusun perencanaan revitalisasi secara bertahap dan berkelanjutan antar

tahun anggaran.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikonstruksikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Masih banyak kontrak pekerjaan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang perlu dilakukan adendum perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan berpotensi menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun melalui Rekening Penampungan (RPATA).

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak yang berjalan guna memastikan alasan keterlambatan serta kelayakan pemberian adendum perpanjangan waktu, serta penguatan perencanaan jadwal, pengawasan pelaksanaan di lapangan, dan manajemen risiko agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

Q | Isu Peluang Investasi Daerah, meliputi:

1. Tidak adanya penambahan jumlah peluang investasi baru maupun nilai investasi (tetap pada 4 peluang dengan nilai Rp5,72 triliun) dibandingkan bulan sebelumnya.
2. Laporan APID Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru mengalami kendala karena belum adanya respon atau tindak lanjut dari Direktorat SMI sejak tahun sebelumnya.
3. Mayoritas peluang investasi (75% atau 3 dari 4 peluang) belum menunjukkan perkembangan atau pembaruan tindak lanjut sama sekali.

R | Rekomendasi Peluang Investasi Daerah, diperlukan:

1. Kanwil perlu melakukan koordinasi secara berkala kepada Direktorat SMI terkait kejelasan status laporan APID Pengelolaan Limbah Medis (B3) Banjarbaru agar dapat segera ditindaklanjuti.
2. Melakukan tinjauan lapangan atau diskusi dengan stakeholder terkait untuk 3 peluang investasi yang belum ada update, guna mengidentifikasi hambatan spesifik yang menyebabkan progres terhenti.
3. Mengingat nilai investasi yang cukup besar (Rp5,72 triliun), diperlukan strategi pemasaran atau ekspose peluang investasi yang lebih masif untuk menarik minat investor potensial.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG tetap 195 sama dengan periode sebelumnya, jumlah supplier semula 248 menjadi 250, dan penerima manfaat semula 503.385 turun menjadi 497.849 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Beberapa sekolah sedang memasuki masa liburan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, sehingga jumlah penerima manfaat MBG mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

SPPG agar berkoordinasi dengan sekolah guna penyediaan MBG sesuai dengan siswa yang masuk sekolah.